



KLIPING KORAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Harian Nasional : Kompas Media Indonesia Seputar Indonesia
 (lainnya)
Harian Lokal : Radar Banten Kabar Banten Satelit News
 Banten Pos (lainnya)
Hari/Tanggal : Selasa 5 Desember 2023
Halaman Koran : 1 & 11

Seleksi KI Provinsi Banten di Tangan DPRD

Pemprov Banten Rekomendasikan Satu Nama

SERANG, (KB).- Tahapan Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten periode 2023-2027 kini memasuki babak akhir. Dalam tahap ini, 15 calon anggota KI Provinsi Banten telah lulus seleksi. Kelimabelas nama tersebut telah diserahkan (Timsel) ke Penjabat (Pj) Gubernur Banten. Selanjutnya, Pj Gubernur merekomendasikan calon anggota KI Provinsi Banten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk

dilakukan *fit and proper test* atau uji kelayakan hingga terpilih 5 calon anggota KI Provinsi Banten untuk ditetapkan.

Sehubungan itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar sudah meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan.

Informasi yang dihimpun dari berbagai narasumber, Pemerintah Provinsi (Pemprov)

Bersambung ke halaman 11

● Pemprov Banten (Sambungan dari halaman 1)

Banten merekomendasikan satu nama dari 15 nama yang disampaikan ke DPRD Provinsi Banten sebagai perwakilan dari unsur pemerintah. Sebagaimana juga dibenarkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Kominfo, Statistik, Persandian Provinsi Banten Nana Suryana.

Ia menuturkan, sebagaimana hasil keputusan Tim Seleksi Calon KI Provinsi Banten, ada limabelas nama yang disampaikan ke DPRD Provinsi Banten untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. "15 orang calon yang disampaikan ke DPRD oleh Pemprov Banten," katanya kepada **Kabar Banten**, Senin (4/12/2023).

Kelimabelas nama Calon Anggota KI Provinsi Banten itu, yakni Ahmad Saparudin, Garry Vebrian, Idrus, Ifan Novriyanto, Iman Sampurna, Imron Mahrus, Karel Martel, Kori Kurniawan, M Johari, Maskur, Moch Ojat Sudrajat S, Nana Subana, Siti Khopipah, Tubagus Nuruzaman, dan Zulpikar.

Dari limabelas nama itu, dia membenarkan hanya satu yang direkomendasikan sebagai unsur dari perwakilan pemerintah. "Iya kang," ujarnya membenarkan hanya satu yang direkomendasikan sebagai unsur dari perwakilan pemerintah.

Menurut dia, itu dari tim seleksi. "Itu dari timsel," tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Syaeful Bahri mengatakan, semua tahapan seleksi Calon Anggota KI Provinsi Banten rujukannya adalah regulasi. "Kita harus kembali ke regulasi," ucapnya.

Ia melihat dalam tahapan uji kepatutan dan kelayakan, sebaiknya DPRD Provinsi Banten diberikan pilihan-pilihan sebagai perbandingan dalam memberikan penilaian. "Kalau satu nama berarti kan kerja-kerja dewan melakukan tes, kalau memang KI itu ada perwakilan dari pemerintah," katanya.

Jika kemudian usulannya dari unsur pemerintah hanya satu, dia mempertanyakan urgensinya DPRD Provinsi Ban-

ten dalam melakukan. "Kalau usulan pemerintah itu harga mati dari gubernur, pertanyaannya fungsi DPRD untuk melakukan *fit and proper test*," ujarnya.

Bahkan, menurut dia, DPRD Provinsi Banten mungkin tidak melakukan *fit and proper test*, karena yang diusulkan dari unsur pemerintah hanya satu atau tidak diberikan pilihan lain.

"Berarti tidak mungkin dilakukan, padahal lagi-lagi itu perintah regulasi. Intinya dewan, silakan kalau memang hak untuk *fit and proper test* dengan satu nama. Berarti kan memang tidak ada pilihan dewan. Terserah dewan akhirnya," ucapnya.

Ia berharap, jika masih memungkinkan agar rekomendasi dari unsur pemerintah lebih dari satu, sehingga DPRD Provinsi Banten punya pilihan.

"Tapi kami sebagai pengamat kebijakan publik berharap, tentu dengan beberapa kandidat sekiranya kan dewan punya pilihan," tuturnya. **(Irfan Muntaha)*****